



C A T A T A N

dari
desa
tentang
desa

Perkumpulan Bantaya (Palu) dan Yayasan Kemala (Jakarta)

Catatan Dari Desa Tentang Desa / editor,
Bernadinus Steny. -- Cet. 1. -- Palu :
Perkumpulan Bantaya, 2005.
xii + 117 hlm. ; 17,6 x 25 cm.

ISBN: 979-25-3780-5

I. Desa. I. Steny, Bernadinus.

352.007 22

Penulis

- Agus Tagunu
- Sammy J. Manopo
- Abd. Gafar Karim, Marce Lamatoti dan Ardin
- Moh. Amin Dj. Naraibo
- Oktavianus B. Dongka
- Fathurrahman, Tasnuddin, Rahmat, Razak, Roslina, Zaenab dan Pos Informasi Kampung
- Kadi Kalahe
- Adam
- Tinus Yolungata
- Asrudin
- Suleman Gena, Sumarno (Alm.) dan Mardin
- Ahmad Zein
- Bahrhun Tandesura
- Oktavianus Aturea
- Enos Lagimpu, Viktor, Nixen Lumba, Hasna, Jania, Zaenab dan Adi Rahmat Wijaya
- Syafruddin AB. Juma, H. Andi Ando Pelang, Nurlili, Mustamin, M. Rais, Maharuddin, Kiraman, Anton dan Wing Prabowo
- Marthen Tatengnge'

Layout dan Tata Letak

Didin Suryadin

Design Sampul

Swartato

Cetakan Pertama, November 2005

Penerbit

Perkumpulan Bantaya (Palu) dan Yayasan Kemala (Jakarta)

Perjuangan Menjadi Kecamatan Pipikoro

Oleh. F. Idit

Pipikoro berasal dari kata pipi yang artinya tepian air dan koro berarti sungai. Dalam menjalankan rutinitas sehari-hari, pada dasarnya, masyarakat Pipikoro khususnya masyarakat Peana (Lo Peana) masih memiliki hukum adat yang masih kuat. Hal ini terbukti dari masih efektifnya peran lembaga adat menjerat sanksi apabila ada aturan adat yang dilanggar.

Dalam waktu yang cukup lama Pipikoro menjadi wilayah yang akses pembangunannya sangat terbatas. Rencana pemekaran Kecamatan Kulawi (Ria Liwo Mpo, Gaa Kamagaua Kulawi) menjadi awal terbukanya Pipikoro terhadap dunia luar. Waktu itu, dibangun sebuah jembatan permanen di Mu (J' Mu) sebagai titik awal yang membuka wilayah Pipikoro.

Embrio Kecamatan Pipikoro berawal dari masyarakat Peana (To Peana). Mereka berjumlah kurang lebih hanya 15 KK karena sebagiannya tinggal di Rante. Peana adalah hal cikal bakal lahirnya Perwakilan Kecamatan Kulawi. Ketika itu, seorang Maradika Malolo ditempatkan oleh Magau (Camat) Kulawi dengan status Maradika Malolo. Selanjutnya Pipikoro ditetapkan sebagai Distrik dan kemudian menjadi Perwakilan Kecamatan Kulawi. Kronologi peralihan administrasi pemerintahan di Pipikoro adalah sebagai berikut:

| Tahun | Maradika Malolo | Distrik | Petugas Kecamatan Kulawi | Perwakilan Kecamatan |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| 1917-1930 | Togantu | W. Mainga Losso | | |
| 1930-1949 | Djempa | | | |
| 1949-1965 | | | | |
| 1966-1968 | | | Benyamin Sau Djaru | |
| 1969-1983 | | | | Benyamin Balibi |
| 1984-1992 | | | | Edison Balibi |
| 1992-2001 | | | | Dolton Losso |

1. Rencana Pembentukan Kecamatan Baru

Pada tanggal 24 Oktober 2001, Camat Kulawi yang waktu itu dijabat oleh Drs. Livingstone Sango mengundang Kepala Desa Pipikoro Timur dan Tengah. Kepala Perwakilan Kecamatan Kulawi di Peana yang waktu itu dijabat oleh Bapak Dalton Losso BBA, untuk membicarakan lepasnya Pipikoro dari Perwakilan Kecamatan menjadi kecamatan baru. Musyawarah juga mengundang beberapa pihak terkait yakni:

1. Tokoh masyarakat 1 orang;
2. Lembaga Musyawarah Desa 1 orang;
3. Lembaga Adat 1 orang;
4. Tokoh pemuda 1 orang;
5. Tokoh wanita 1 orang.

Musyawarah ini menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kecamatan baru Pipikoro. Hasil musyawarah kemudian dikirim ke Bupati Donggala, saat itu Nabi Bidja, untuk dirumuskan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang selanjutnya dibawa ke DPRD Kabupaten Donggala untuk segera dibahas menjadi Perda. Hal yang krusial dalam rencana ini adalah menyangkut wilayah dan kesiapan masyarakat. Hasil kesepakatan ini kemudian diikuti oleh desakan berbagai kelompok masyarakat, antara lain Forum Peduli Masyarakat Peana yang terus-menerus mendesakkan peningkatan status perwakilan kecamatan menjadi kecamatan.

2. Penetapan Wilayah

Persoalan wilayah selain menyangkut luas juga mencakup jumlah desa yang akan bergabung dengan kecamatan baru ini. Berdasarkan hasil pertemuan tanggal 23 November 2000 tentang penyerahan lokasi (pembebasan tanah) diperoleh kepastian, bahwa sebagian besar tanah telah dibebaskan dan diserahkan oleh pemiliknya yang bermukim di Rante. Masyarakat pemilik tanah juga menyambut baik rencana ini karena sudah lama mereka menantikan pemerataan pembangunan yang hanya bisa dinikmati kota-kota lain. Wilayah yang dibutuhkan juga mencakup areal perkantoran pemerintah di Peana.

Berikut ini merupakan usulan desa dan jarak masing-masingnya yang diusulkan masuk dalam Kecamatan Pipikoro.

Dari Utara Desa Peana, meliputi:

- Desa Gimpu sampai ke Desa Koja : 16 km.;
- Desa Koja sampai ke Desa Morui : 6 km.;
- Desa Morui sampai ke Desa Peana : 10 km.

Dari Desa Peana ke arah Barat:

- Desa Peana sampai ke Desa Kantewu : 9 km.;

- Desa Kantewu sampai ke Desa Onu : 4 km.;
- Desa Onu sampai ke Desa Lonebasa : 7 km.;
- Desa Lonebasa sampai ke Desa Lawe : 14 km.

Dari Desa Peana ke arah Timur:

- Desa Peana sampai ke Desa Mapahi : 18 km.;
- Desa Mapahi sampai ke Desa Banasu : 4 km.;
- Desa Banasu sampai ke Desa Mamu : 18 km.;
- Desa Mamu sampai ke Desa Kalamanta : 9 km.

Dengan demikian ada 12 desa (termasuk Peana) yang diusulkan masuk dalam Kecamatan Pipikoro.

3. Menyambut Kecamatan Baru

Masyarakat Pipikoro khususnya masyarakat Peana melakukan persiapan yang sangat baik untuk mendukung program pemerintah melakukan pemekaran wilayah Kecamatan Kulawi. Sebelumnya, terjadi tarik menarik antar berbagai kelompok masyarakat mengenai kedudukan Ibu Kota Kecamatan. Namun berkat perjuangan Forum Peduli Masyarakat Peana, maka negosiasi untuk tetap menjadikan Peana sebagai Ibu Kota akhirnya tercapai. Forum ini dibentuk pada tanggal 4 Desember 2001 untuk menjadi salah satu wadah persiapan masyarakat menyambut kecamatan baru Pipikoro. Persiapan menyambut kecamatan baru adalah sebagai berikut:

- a. Dengan ditetapkannya Peana sebagai Ibu Kota Kecamatan Pipikoro Kulawi Selatan, maka masyarakat Peana menyerahkan lahan perkebunannya yang masih produktif seluas kurang lebih 7 ha. (74.480 m²) untuk pembangunan berbagai fasilitas perkantoran pemerintahan kecamatan dan perumahan bagi personil (pegawai). Penyerahan lahan ini dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b. Mayoritas desa-desa yang masuk wilayah Kulawi Selatan sebanyak 11 desa telah sepakat, bahwa Ibu Kota Kecamatan Pipikoro bertempat di Peana. Alasannya adalah karena kurang lebih 34 tahun Peana menjadi tempat pelayanan administrasi pemerintahan umum sebagai Perwakilan Kecamatan Kulawi Selatan.

Berdasarkan hasil Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Donggala tanggal 28 Maret 2002 di Palu ditetapkan Perwakilan Kecamatan Kulawi berubah status menjadi Kecamatan Pipikoro dengan Ibu Kotanya Peana. Peresmian Kecamatan Pipikoro ditetapkan pada tanggal 27 April 2004.

Demikianlah sekilas uraian perjuangan Masyarakat Peana mengubah wilayah administrasi Perwakilan Kecamatan Kulawi menjadi Kecamatan Pipikoro. Uraian ini setidaknya menyatakan, bahwa perjuangan politik rakyat pada tingkat mana pun jika dilakukan secara serius pasti akan membuahkan hasil.